

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.D. Belinfante. 1985. *Kort Begrip van het Administratief Recht*. Alphen aan de Rijn: Samsom Uitgeverij.
- Abdurrahman. 1996. *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- De Haan, P., et al., 1986. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*. deel 1, Kluwer. Devender.
- Donner, A.M., 1987. *Nedherlands Bestuursrecht*. Alphen aan Rijn. Samsom H.D. Tjeenk Willink.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harsono, Boedi. 2007. *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya (edisi revisi 2007)*. Jakarta: Djambatan.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joeniarto. 1986. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Lotulung, Paulus E. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. 2011. *Pencabutan Hak, Pembebasan Hak, dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Parlindungan, AP. 1993. *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Mandar Maju.

- Poerwadaminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rubaie, Achmad. 1993. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiarto, Umar Said. Suratman, Noorhudha Muchsin. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Perss.
- Sumardjono, Maria SW. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Van Poelje. 1964. *Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde*. Alphen aan de Rijn: Samsom.
- Van Wijk, H.D./Willem Konijnenbelt. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utrecht. Uitgeverij Lemma BV.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.
- Undang Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 288.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
- Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Internet

<http://www.kpa.or.id/news/blog/mengapa-kereta-cepat-harus-dibatalkan/>, diakses pada hari rabu 9 Maret 2016, pukul 18:56 WIB.

https://www.academia.edu/5473437/Pengertian_dan_ruang_lingkup_hukum_agraria, diakses pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016, pukul 19:52 WIB.